



REPUBLIK INDONESIA



EVALUASI KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017



Oleh:

Drs. Nugroho

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



OUTline



PEMBAHASAN

- 1 KEGIATAN DEKONSENTRASI
TAHUN 2017**
- 2 EVALUASI DEKONSENTRASI DITJEN
BINA ADWIL TAHUN 2017**
- 3 RENCANA KEGIATAN DEKONSENTRASI
TAHUN 2018**
- 4 KENDALA DAN TINDAK LANJUT**

1

**KEGIATAN
DEKONSENTRASI
TAHUN 2017**

DASAR PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pelaksanaan Urusan lebih Efisien dan efektif dilaksanakan oleh Daerah

Terciptanya Komunikasi dan hubungan kerja yang serasi antar susunan pemerintahan

Mendorong percepatan kebijakan/ program Nasional

SINERGI PUSAT DAN DAERAH

OPTIMALISASI KINERJA KEMENDAGRI

KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI

1

- Penyelarasan antara urusan dengan program/kegiatan Dekonsentrasi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

2

- Memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi

3

- Mempercepat pencapaian sasaran Proritas Nasional

4

- Memberikan daya ungkit dan manfaat yang signifikan

5

- Penajaman kriteria lokasi dan alokasi

6

- Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi (SDM, Regulasi dan Kelembagaan)

Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2017

No	Jenis Dekonsentrasi	Alokasi (000)	Ket
1	Peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Prov dan Dekonsentrasi koordinasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP di daerah (pelayanan umum)	12.188.126	33 Prov
2	Penguatan penyelenggaraan PTSP di daerah		8 Prov
3	Pembinaan kompetensi aparatur daerah dalam pengurangan resiko bencana	2.350.000	8 Prov
4	Koordinasi penegasan status hukum batas antar negara di darat, pengelolaan perbatasan dan PPKT, peningkatan hubungan kerjasama RI-Malaysia, RI-RDTL, RI-PNG	1.700.000	7 Prov
5	Peningkatan kapasitas SDM bagi Satpol PP melalui jabatan fungsional Pol PP	1.200.000	5 Prov
6	Penegasan batas daerah, pembakuan nama rupabumi dan updating data wilayah	7.300.000	23 Prov
	TOTAL	24.738.126	

2

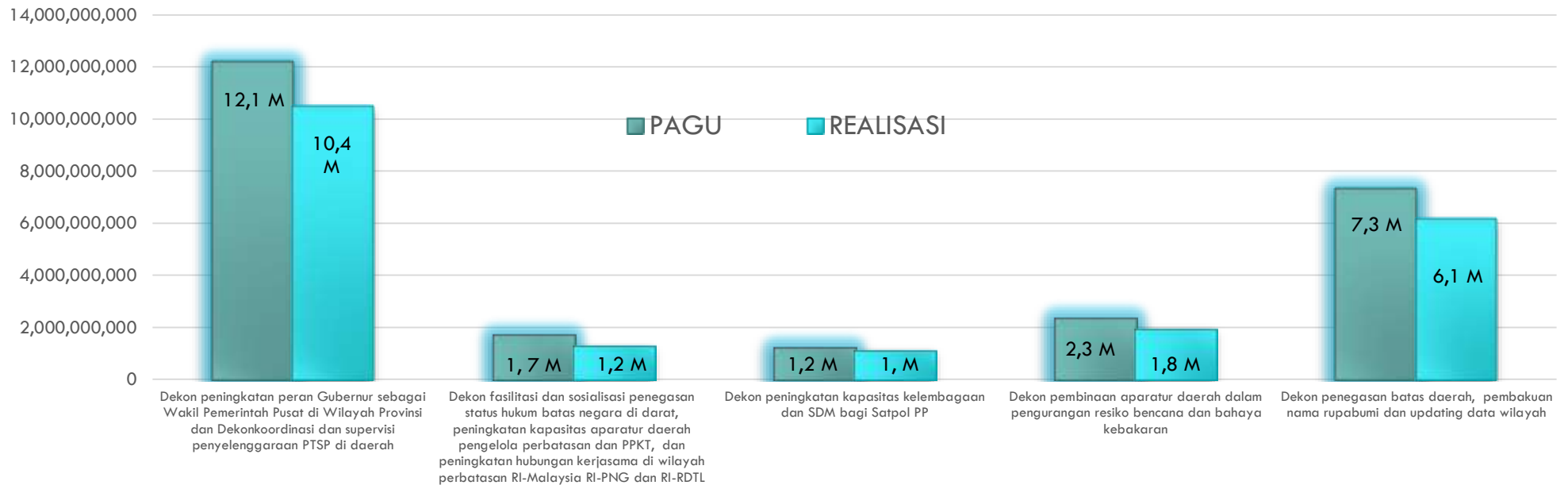
**EVALUASI
DEKONSENTRASI 2017**

Pagu Dekonsentrasi Bidang Bina Adwil Tahun 2014-2017

(000)

NO	DEKONSENTRASI	ALOKASI ANGGARAN (RP)				LOKASI SKPD (PROV)			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi	25,000,000	23,712,812	23,000,000	12,188,126	33	33	34	33
2	Penguatan & pengembangan kerjasama daerah	-	2,857,951	-	6	-	7	-	-
3	Penguatan penyelenggaraan PTSP di daerah	-	-	3,000,000		-	-	10	8
4	Fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kegiatan sosekbud dengan negara tetangga	3,000,000	3,158,961	3,400,000	1,700,000	7	7	7	7
5	Penegasan batas daerah dan pembakuan nama rupabumi unsur alami	13,000,000	12,813,575	15,250,000	7,300,000	23	23	24	23
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP serta Linmas	14,885,931	16,207,434	6,000,000	1,200,000	28	29	17	5
7	Pengurangan risiko bencana dan bahaya kebakaran	20,195,732	14,249,267	5,500,000	2,350,000	24	30	14	8
Total		76,081,663	73,000,000	56,150,000	24,738,126				

LAPORAN KONSOLIDASI DEKONSENTRASI PER KEGIATAN TAHUN A. 2017



No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dekon peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi dan Dekonkoordinasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP di daerah	12.188.126.000	10.455.986.708	85,79
2	Dekon fasilitasi dan sosialisasi penegasan status hukum batas negara di darat, peningkatan kapasitas aparatur daerah pengelola perbatasan dan PPKT, dan peningkatan hubungan kerjasama di wilayah perbatasan RI-Malaysia RI-PNG dan RI-RDTL	1.700.000.000	1.261.256.920	74,19
3	Dekon peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP	1.200.000.000	1.097.622.899	91,47
4	Dekon pembinaan aparatur daerah dalam pengurangan resiko bencana dan bahaya kebakaran	2.350.000.000	1.907.579.700	81,17
5	Dekon penegasan batas daerah, pembakuan nama rupabumi dan updating data wilayah	7.300.000.000	6.160.433.667	84,39
TOTAL		24.738.126.000	20.882.879.894	84,42



KEGIATAN DEKONSENTRASI PER- SKPD TAHUN 2017

- 1 Dekonsentrasi koordinasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP di daerah (pelayanan umum)
- 2 Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Provinsi	Satker	Pagu Anggaran APBN-P	Realisasi		Keterangan
			Anggaran (Rp)	R (%)	
1 Nusa Tenggara Timur	Setda	267.701.000	267.701.000	100	
2 Gorontalo	Setda	274.898.000	274.828.000	99,97	
3 Kep. Bangka Belitung	Setda	274.818.000	273.196.200	99,41	
4 Maluku	Setda	302.367.000	297.222.500	98,30	
5 Maluku Utara	Setda	293.838.000	287.442.500	97,82	
6 Sulawesi Selatan	Setda	299.190.000	292.132.300	97,64	
7 Sumatera Utara	Setda	288.684.000	275.908.100	95,57	
8 Sulawesi Utara	Setda	284.769.000	268.969.840	94,45	
9 Sumatera Barat	Setda	272.965.000	257.627.750	94,38	
10 Nusa Tenggara Barat	Setda	754.922.000	709.808.070	94,02	Dekon GWPP + PTSP
11 Kalimantan Barat	Setda	236.380.000	221.901.430	93,87	
12 Aceh	Setda	297.529.000	277.974.372	93,43	
13 Sumatera Selatan	Setda	711.698.000	655.917.464	92,16	Dekon GWPP + PTSP
14 Sulawesi Tengah	Setda	744.502.000	683.756.500	91,84	
15 Bali	Setda	284.490.000	259.493.650	91,21	
16 Jambi	Setda	259.719.000	234.511.682	90,29	

Provinsi	Satker	Pagu Anggaran APBN-P	Realisasi		Keterangan
			Anggaran (Rp)	R (%)	
17 Sulawesi Barat	Setda	260.470.000	234.582.30	90,06	
18 Kepulauan Riau	Setda	672.855.000	603.009.300	89,62	Dekon GWPP + PTSP
19 Sulawesi Tenggara	Setda	257.251.000	227.338.750	88,37	Dekon GWPP + PTSP
20 D.I. Yogyakarta	Setda	610.256.000	517.625.450	84,82	Dekon GWPP + PTSP
21 Bengkulu	Setda	303.099.000	256.524.400	84,63	
22 Riau	Setda	704.869.000	594.953.400	84,41	Dekon GWPP + PTSP
23 Kalimantan Timur	Setda	258.755.000	216.174.200	83,54	
24 Lampung	Setda	257.100.000	206.881.700	80,47	
25 Kalimantan Selatan	Setda	665.576.000	524.377.300	78,79	Dekon GWPP + PTSP
26 Jawa Barat	Setda	716.838.000	544.081.000	75,90	Dekon GWPP + PTSP
27 Kalimantan Tengah	Setda	252.876.000	181.837.100	71,91	
28 Papua Barat	Setda	311.080.000	204.566.600	65,76	
29 Jawa Tengah	Setda	280.193.000	181.126.000	64,64	
30 Banten	Setda	229.052.000	130.420.000	56,94	
31 Jawa Timur	Setda	315.723.000	178.495.400	56,54	
32 Kalimantan Utara	Setda	243.663.000	115.602.450	47,44	
33 Papua	Setda	-	-	-	
JUMLAH		12.188.126.000	10.455.986.708	85,79	



**DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



3

Dekonsentrasi koordinasi penegakan status hukum batas antar negara di darat, pengelolaan perbatasan dan PPKT serta peningkatan hubungan kerjasama RI-Malaysia, RI-RDTL, RI-PNG

Provinsi	Satker	Pagu Anggaran		Realisasi	
		APBN-P	Anggaran (Rp)	R (%)	
1 Nusa Tenggara Timur	Setda	300.000.000	300.000.000	100	
2 Papua	Setda	-	-	-	
3 Kepulauan Riau	Setda	300.000.000	239.534.300	79,84	
4 Riau	Setda	300.000.000	235.442.220	78,48	
5 Kalimantan Barat	Setda	300.000.000	221.138.500	73,71	
6 Kalimantan Utara	Setda	300.000.000	87.670.200	29,22	
7 Papua	Setda	-	-	-	
		1.700.000.000	1.261.256.920	74,19	

4

Dekonsentrasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP

Provinsi	Satker	Pagu Anggaran		Realisasi	
		APBN-P	Anggaran (Rp)	R (%)	
1 Nusa Tenggara Timur	Setda	250.000.000	250.000.000	100	
2 Bali	Setda	250.000.000	230.772.750	92,31	
3 Maluku Utara	Setda	250.000.000	224.320.200	89,73	
4 Sumatera Utara	Setda	250.000.000	224.011.849	89,60	
5 Sumatera Barat	Setda	200.000.000	168.518.100	84,26	
		1.200.000.000	1.097.622.899	91,47	



5 Dekonsentrasi pembinaan aparatur daerah dalam pengurangan resiko bencana dan bahaya kebakaran

Provinsi	Satker	Pagu Anggaran	Realisasi	
		APBN-P	Anggaran (Rp)	R (%)
1 Sulawesi Utara	Setda	300.000.000	292.837.500	97,61
2 Kepulauan Riau	Setda	300.000.000	288.223.900	96,07
3 Kalimantan Timur	Setda	300.000.000	282.827.650	94,28
4 Nusa Tenggara Timur	Setda	300.000.000	270.934.000	90,31
5 Kalimantan Tengah	Setda	300.000.000	269.077.800	89,69
6 Jawa Barat	Setda	250.000.000	216.728.000	86,69
7 Jawa Timur	Setda	350.000.000	286.950.850	81,99
8 Lampung	Setda	250.000.000	-	-

2.350.000.000 1.907.579.700 81,17



6 Dekonsentrasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP

Provinsi	Satker	Pagu Anggaran	Realisasi	
		APBN-P	Anggaran (Rp)	R (%)
1 Nusa Tenggara Timur	Setda	300.000.000	300.000.000	100,00
2 Riau	Setda	350.000.000	349.952.400	99,99
3 Sulawesi Tengah	Setda	375.000.000	373.067.600	99,48
4 Jambi	Setda	350.000.000	346.194.500	98,91
5 Gorontalo	Setda	250.000.000	241.179.000	96,47
6 Sumatera Selatan	Setda	300.000.000	288.821.217	96,27
7 Maluku Utara	Setda	300.000.000	287.666.100	95,89
8 Sulawesi Selatan	Setda	300.000.000	286.800.850	95,60
9 Aceh	Setda	350.000.000	318.765.100	91,08
10 D.I Yogyakarta	Setda	200.000.000	181.934.700	90,97
11 Sulawesi Utara	Setda	375.000.000	340.829.800	90,89
12 Kalimantan Selatan	Setda	200.000.000	180.358.100	90,18
13 Sulawesi Barat	Setda	550.000.000	487.772.800	88,69
14 Kalimantan Tengah	Setda	200.000.000	175.976.400	87,99
15 Kalimantan Timur	Setda	200.000.000	173.497.100	86,75
16 Sulawesi Tenggara	Setda	550.000.000	450.443.201	81,90
17 Kalimantan Barat	Setda	450.000.000	344.090.009	76,46
18 Sumatera Barat	Setda	350.000.000	254.616.750	72,75
19 Lampung	Setda	300.000.000	211.402.800	70,47
20 Jawa Tengah	Setda	300.000.000	169.686.400	56,56
21 Banten	Setda	200.000.000	112.405.000	56,20
22 Kalimantan Utara	Setda	400.000.000	208.111.440	52,03
23 Jawa Timur	Setda	150.000.000	76.862.400	51,24
		7.300.000.000	6.160.433.667	84,39

3

**RENCANA KEGIATAN
DEKONSENTRASI
TAHUN 2018**



**DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

PAGU ANGGARAN PER KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN 2018



No	Jenis Dekonsentrasi	Rencana Alokasi	Ket
1	Peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi	9.000.000.000	34 Prov
2	Penguatan penyelenggaraan PTSP di daerah	6.000.000.000	16 Prov/ 51 Kab/kota
TOTAL		15.000.000.000	





ALOKASI DAN LOKASI KEGIATAN DEKONSENTRASI 2018



Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di 34 Provinsi

No	Provinsi	Satker	Alokasi Anggaran
1	ACEH	Setda	270.186.000
2	SUMATERA UTARA	Setda	278.250.000
3	SUMATERA BARAT	Setda	243.795.000
4	R I A U	Setda	235.428.000
5	KEPULAUAN RIAU	Setda	237.831.000
6	J A M B I	Setda	260.334.000
7	SUMATERA SELATAN	Setda	248.181.000
8	BANGKA BELITUNG	Setda	254.694.000
9	BENGKULU	Setda	270.951.000
10	LAMPUNG	Setda	228.855.000
11	BANTEN	Setda	223.940.000
12	DKI JAKARTA	Setda	179.134.000
13	JAWA BARAT	Setda	236.268.000
14	JAWA TENGAH	Setda	265.952.000
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Setda	203.590.000
16	JAWA TIMUR	Setda	381.268.000

No	Provinsi	Satker	Alokasi Anggaran
17	BALI	Setda	308.292.000
18	KALIMANTAN BARAT	Setda	225.696.000
19	KALIMANTAN TENGAH	Setda	264.106.000
20	KALIMANTAN SELATAN	Setda	236.827.000
21	KALIMANTAN TIMUR	Setda	250.556.000
22	SULAWESI UTARA	Setda	254.383.000
23	GORONTALO	Setda	312.245.000
24	SULAWESI TENGAH	Setda	273.450.000
25	SULAWESI BARAT	Setda	279.654.000
26	SULAWESI TENGGARA	Setda	258.130.000
27	SULAWESI SELATAN	Setda	306.633.000
28	NUSA TENGGARA BARAT	Setda	243.904.000
29	NUSA TENGGARA TIMUR	Setda	263.900.000
30	MALUKU	Setda	289.455.000
31	MALUKU UTARA	Setda	264.647.000
32	PAPUA	Setda	348.723.000
33	PAPUA BARAT	Setda	355.530.000
34	KALIMANTAN UTARA	Setda	245.012.000



ALOKASI DAN LOKASI KEGIATAN DEKONSENTRASI 2018



Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 16 Provinsi / 51 Kab/kota

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Alokasi Anggaran
1.	Sumatera Barat	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota	409.413.000
2.	Riau	Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak	346.316.000
3.	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun	302.860.000
4.	Jambi	Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo	355.465.000
5.	Sumatera Selatan	Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin	394.713.000
6.	Bengkulu	Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara	355.145.000
7.	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung Timur	329.287.000
8.	Banten	Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang	312.491.000
9.	D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman	308.665.000
10.	Bali	Kota Denpasar, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Tabanan	415.106.000
11.	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat	361.940.000
12.	Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kapuas Hulu	360.795.000
13.	Sulawesi Tengah	Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol	399.113.000
14.	Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Kabupaten Luwuk Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone	501.801.000
15.	Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara	432.540.000
16.	Maluku	Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah	414.350.000

4

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Kendala

1. Belum dilaksanakannya kegiatan yang sudah tercantum dalam RKA-K/L sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
2. Kegiatan telah dilaksanakan namun proses penyelesaian administrasi pencairan kegiatan belum sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
3. Implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi terhadap munculnya kendala kelembagaan dan SDM diantaranya terdapat perubahan struktur pejabat pelaksana/pejabat perbendaharaan, perubahan nomenklatur satker, bahkan perubahan/revisi satker. Di samping itu sebagian terdapat perubahan SDM berkenaan dengan re-organisasi sehingga pada umumnya pengelola kegiatan belum pernah melaksanakan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan bidang administrasi kewilayahan;
4. Adanya kendala koordinasi dan komunikasi pada sebagian satker antara KPA yang berdasarkan Juknis telah ditetapkan pada Biro Pemerintahan, dengan PPK pada sebagian kegiatan Satpol PP dan kegiatan pengurangan resiko bencana yang sesuai juknis ditetapkan pada satker Satpol PP dan BPBD sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pembinaan/asistensi dan sosialisasi terhadap satker pengelola kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi serta menghindari munculnya ego kelembagaan mengingat pada hakekatnya kegiatan dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan bukan merupakan pelimpahan kewenangan kepada organisasi perangkat daerah.
3. Memastikan tingkat kedisiplinan dalam pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan (tertib administrasi), antara lain :
 - a. Konsisten dan komitmen terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - b. Penyampaian data kontrak ke KPPN dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan;
 - c. Pengendalian dalam pengelolaan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP);
 - d. Berkoordinasi dengan pembina teknis kegiatan dalam hal terjadi revisi anggaran atau pejabat perbendaharaan;
 - e. Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara, perlu didukung dengan rekonsiliasi internal antara SAK dengan SIMAK BMN;
 - f. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang di dalamnya memuat informasi rinci berkenaan dengan semua transaksi keuangan.



TERIMA KASIH

